



Penguatan Akuntabilitas Keuangan Koperasi melalui Penyusunan PERSUS Kebijakan Akuntansi pada KPUD Kieskendo

Strengthening Cooperative Financial Accountability through the Preparation of PERSUS Accounting Policies at the Kieskendo KPUD

Luhglatno^{1*}, Daniel Kartika Adhi², Susanti Wahyuningsih³, Panca Wahyuningsih⁴

^{1,2,4}Program Studi Sarjana Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara, Indonesia

³Program Studi Sarjana Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: luhglatno_smg@yahoo.co.id

Article History:

Naskah Masuk: 23 April 2026

Revisi: 29 Mei 2026

Diterima: 20 Juni 2026

Terbit: 30 Juni 2026

Keywords: Accounting Policies; Cooperatives; Financial Accountability; PERSUS; SAK EP; SAK ETAP.

Abstract. The purpose of this community service activity was to improve the financial accountability of cooperatives by developing a PERSUS on the KPUD Kieskendo in Panunggalan Village, Pulokulon District, Grobogan Regency. The activity was conducted through a workshop and mentoring session involving the cooperative's management and supervisory board. It began with a presentation on the importance of financial accountability, good cooperative governance, and the implementation of SAK EP. The identification results indicated that the cooperative lacked a written accounting policy for internal oversight, financial reporting, and transaction recording. Next, the community service team drafted a PERSUS, which regulates financial reporting, cash and bank management, loan receivables, the formation of CKPN, internal supervision, related party transactions, and fraud prevention. To align the policy with the cooperative's operational needs, discussions on the draft were conducted through participatory, article-by-article discussions. The results of the activity indicated that the management and supervisory board had a better understanding of the benefits of accounting policies for increasing transparency and accountability in cooperative management. It is hoped that the PERSUS will serve as an official guideline for creating more professional, transparent, and sustainable cooperative governance.

Abstrak.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan koperasi dengan membuat PERSUS tentang kebijakan akuntansi pada KPUD Kieskendo di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk workshop dan pendampingan dengan melibatkan pengurus dan pengawas koperasi. Dimulai dengan presentasi tentang pentingnya akuntabilitas keuangan, tata kelola koperasi yang baik, dan penerapan SAK EP. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa koperasi tidak memiliki kebijakan akuntansi tertulis untuk mengawasi secara internal, menyusun laporan keuangan, dan mencatat transaksi. Selanjutnya, tim pengabdian membuat draf PERSUS yang mengatur sistem pelaporan keuangan, pengelolaan kas dan bank, piutang dan pinjaman, pembentukan CKPN, pengawasan internal, transaksi pihak berelasi, dan pencegahan fraud. Untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan operasional koperasi, pembicaraan draf dilakukan secara partisipatif melalui diskusi isi PERSUS pasal demi pasal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengurus dan pengawas lebih memahami manfaat kebijakan akuntansi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi. Diharapkan bahwa PERSUS akan berfungsi sebagai pedoman resmi untuk menciptakan tata kelola koperasi yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntabilitas Keuangan; Kebijakan Akuntansi; Koperasi; PERSUS; SAK EP; SAK ETAP.

1. PENDAHULUAN

Salah satu lembaga ekonomi kerakyatan, koperasi yang berusaha dalam bidang simpan pinjam, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pembiayaan dan simpanan bagi anggota mereka. Koperasi tidak hanya membantu orang mengumpulkan uang, tetapi juga membantu membangun ekonomi masyarakat yang didasarkan pada kekeluargaan dan gotong royong. Untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis dan meningkatkan kepercayaan anggota, koperasi harus dapat menerapkan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel (Maulana, Marismiati, & Wirakanda, 2023).

Salah satu faktor penting dalam menilai kualitas tata kelola koperasi adalah akuntabilitas keuangan. Laporan keuangan yang disusun secara andal, relevan, dan sesuai standar akuntansi berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota sekaligus sebagai dasar pengambilan keputusan organisasi. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap kepercayaan anggota koperasi (Turi & Muharram, 2023). Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan koperasi (Bengang & Astuti, 2023). Namun demikian, banyak koperasi di Indonesia masih menghadapi masalah dalam menyusun laporan keuangan. Ini termasuk pencatatan transaksi yang tidak konsisten, dokumen pendukung yang tidak lengkap, dan kurangnya pedoman kebijakan akuntansi tertulis yang digunakan untuk proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Kondisi ini dapat menyebabkan laporan keuangan tidak akuntabel atau bahkan fraud (Lestari & Saputra, 2022).

Karena pergeseran dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), koperasi harus mengubah cara mereka mencatat dan menyajikan laporan keuangan mereka. SAK EP dimaksudkan untuk membuat laporan keuangan entitas privat, termasuk koperasi, lebih relevan, kredibel, dan dapat dibandingkan sepanjang waktu. Implementasi SAK EP sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan kekuatan tata kelola keuangan koperasi. Namun, ada banyak tantangan yang menghalangi penerapan standar tersebut. Yang paling menonjol adalah koperasi di tingkat desa yang tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai dan tidak memahami teknis akuntansi (Salman & Sutisna, 2025). Untuk manajemen koperasi, peningkatan sistem pengendalian internal adalah bagian penting dari standar akuntansi. Pengendalian internal yang memadai dapat membantu koperasi melindungi aset mereka, meningkatkan keandalan laporan keuangan, dan mencegah penyalahgunaan dan manipulasi wewenang.

Pengawasan yang buruk terhadap transaksi kas, pinjaman anggota, rekonsiliasi data, dan dokumentasi akuntansi sering terjadi karena praktik pengelolaan keuangan yang tidak didukung oleh sistem pengendalian yang baik. Koperasi membutuhkan kebijakan tertulis yang mengatur pengendalian internal dan prosedur akuntansi secara terstruktur (Iciah, et al., 2024).

KPUD Kieskendo Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola keuangan. Diakui bahwa koperasi belum memiliki peraturan khusus (PERSUS) yang komprehensif untuk kebijakan akuntansi, berdasarkan diskusi pengurus dan pengawas. Pengurus juga perlu lebih memahami prinsip-prinsip akuntansi, pengendalian internal, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), dan cara menghindari *fraud* (Grahita, Budiadnyani, Sunarta, & Arlita, 2025) (Sagala, et al., 2025) (Agha & Fitria, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan karakteristik usaha simpan pinjam koperasi dan persyaratan SAK EP membutuhkan bimbingan. Koperasi masih menghadapi kendala dalam penerapan standar akuntansi dan membutuhkan pedoman kebijakan akuntansi yang sesuai (Saputra, 2022).

Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dan pendampingan penyusunan PERSUS tentang Kebijakan Akuntansi pada KPUD Kieskendo Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pengurus dan pengawas tentang penerapan kebijakan akuntansi yang didasarkan pada SAK EP (Setiajatnika & Hidayat, 2025). Kegiatan ini akan menghasilkan pedoman tertulis yang dapat digunakan sebagai referensi untuk dasar menyusun laporan keuangan koperasi melalui penerapan standar akuntansi (Ayu, Cahyono, & Aspiradi, 2021). Diharapkan pembuatan PERSUS ini akan meningkatkan transparansi, meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan konsistensi pencatatan transaksi, dan membantu membangun tata kelola koperasi yang lebih akuntabel dan berkelanjutan (Miranda, Wahyuni, Wulandari, & Hendra, 2025) (Salman & Sutisna, 2025).

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di KPUD Kieskendo Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan. Sasaran kegiatan adalah pengurus dan pengawas koperasi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan koperasi. Kegiatan dilaksanakan melalui *workshop* partisipatif dan pendampingan penyusunan PERSUS tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi.

Pendekatan partisipatif dipilih karena materi dan substansi kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi operasional, kebutuhan, dan karakteristik usaha simpan pinjam koperasi. Metode *workshop* dinilai dapat meningkatkan pemahaman akuntansi karena peserta dapat terlibat secara aktif dalam diskusi, studi kasus, dan diskusi tentang masalah nyata yang dihadapi koperasi (Khairunnisa, Aminah, Rikumahu, & Al-Fikri, 2024). Identifikasi masalah dan survei awal terhadap sistem pengelolaan keuangan koperasi adalah langkah pertama dari tindakan. Tim pengabdian berbicara dengan pengurus dan pengawas koperasi tentang masalah saat ini. Ini mencakup pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, pengawasan internal, dan penerapan standar akuntansi yang telah diterapkan sebelumnya. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa koperasi tidak memiliki kebijakan akuntansi tertulis yang lengkap. Oleh karena itu, perlu dibuat peraturan internal untuk membantu pencatatan dan pelaporan keuangan. Identifikasi kebutuhan mitra adalah bagian penting dari program pendampingan agar solusi yang diberikan sesuai dengan masalah yang dihadapi koperasi (Yusmaniarti, Bahrin, Hutabarat, & Fitria, 2025).

Hasil identifikasi awal telah mendorong tim pengabdian untuk menyusun draf PERSUS untuk Kebijakan Akuntansi Koperasi. Peraturan Khusus ini mengacu pada SAK EP, peraturan perkoperasian, dan prinsip tata kelola koperasi yang akuntabel. Draft PERSUS mengatur dasar penyusunan laporan keuangan, pengendalian internal, pengelolaan aset dan liabilitas, pembentukan CKPN, transaksi pihak berelasi, penyajian laporan keuangan, dan pencegahan *fraud*. Sebelum *workshop* dimulai, draft dibuat agar peserta memiliki bahan diskusi yang jelas dan dapat memberikan masukan berdasarkan kondisi operasi koperasi (Prastiwi, Atmini, Hanafia, & Putri, 2023). Tahap selanjutnya adalah mengadakan *workshop* yang dihadiri oleh pengurus dan pengawas koperasi. *Workshop* dilaksanakan melalui ceramah, sesi tanya jawab, dan pembahasan draft PERSUS. Pada titik ini, tim pengabdian memberikan pemaparan tentang bagaimana kebijakan akuntansi membantu transparansi dan akuntabilitas keuangan koperasi, penerapan SAK EP, dan peningkatan sistem pengendalian internal. Selanjutnya, peserta *workshop* bersama tim pengabdian membahas pasal-pasal dalam draft PERSUS untuk menyesuaikannya dengan praktik operasional dan kebutuhan koperasi.

Selain *workshop*, peserta juga menerima bantuan teknis untuk menyempurnakan draft PERSUS sesuai dengan masukan tim pengabdian. Untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan koperasi, pendampingan dilakukan. Dalam proses ini, tim pengabdian membantu pengurus koperasi menyesuaikan proses pencatatan transaksi, mekanisme rekonsiliasi, sistem otorisasi, dan pengendalian dokumen akuntansi agar sesuai dengan PERSUS (Mawardi & Herawati, 2024).

Pendekatan pendampingan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan praktis mitra karena peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis, tetapi juga arahan untuk menerapkannya secara praktis (Luhglatno, Adhi, & Aminatuzzuhro, 2023).

Akhir dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menyusun artikel ilmiah PkM. Ini dilakukan untuk menyebarkan hasil *workshop* dalam penyusunan PERSUS Kebijakan Akuntansi di KSP KPUD Kieskendo Desa Panunggalan. Proses penyusunan artikel didokumentasikan secara sistematis. Ini mencakup identifikasi masalah, penyusunan draf PERSUS, pelaksanaan *workshop*, diskusi partisipatif, dan hasil pendampingan dan penyelarasan kebijakan akuntansi dengan operasional koperasi. Diharapkan bahwa artikel PkM ini dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sekaligus menjadi referensi praktis bagi koperasi lain dalam memperkuat akuntabilitas keuangan dan tata kelola koperasi melalui penyusunan kebijakan akuntansi berbasis SAK EP. Publikasi ini juga akan membantu menyebarkan praktik terbaik untuk meningkatkan transparansi keuangan dan tata kelola koperasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk *workshop* dan pendampingan penyusunan PERSUS Tentang Kebijakan Akuntansi pada KPUD Kieskendo Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan. Pengurus dan pengawas koperasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan keuangan koperasi menghadiri *workshop* tersebut. Agenda dimulai dengan penjelasan tentang pentingnya akuntabilitas keuangan koperasi, perubahan yang terjadi pada peraturan akuntansi koperasi, dan penerapan SAK EP sebagai pedoman untuk penyusunan laporan keuangan koperasi. Untuk membantu peserta memahami hubungan antara kebijakan akuntansi, transparansi keuangan, dan tata kelola koperasi yang baik, materi diberikan secara interaktif (Salman & Sutisna, 2025). Hasil diskusi awal di *workshop* menunjukkan bahwa KPUD Kieskendo tidak memiliki kebijakan akuntansi tertulis yang mengatur pengendalian internal, mekanisme pengendalian, pencatatan transaksi, dan pengakuan pendapatan.

Selama ini, pencatatan transaksi dilakukan secara informal tanpa standar yang terdokumentasi secara formal. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pencatatan serta masalah dalam proses pengawasan dan audit. Berbagai koperasi di Indonesia juga mengalami masalah serupa. Mereka masih menghadapi pemahaman yang terbatas tentang standar akuntansi dan tata kelola keuangan koperasi (Yusmaniarti, Bahrin, Hutabarat, & Fitria, 2025).

Berdasarkan persyaratan SAK EP, Peraturan Menteri Koperasi, dan praktik pengendalian internal koperasi, tim pengabdian mempresentasikan draf PERSUS Kebijakan Akuntansi yang telah disusun sebelumnya selama *workshop*. Pengaturan dasar untuk penyusunan laporan keuangan, pengelolaan kas dan bank, piutang, pinjaman, pembentukan CKPN, pengelolaan aset tetap, transaksi pihak berelasi, penyajian laporan keuangan, dan pencegahan fraud dimasukkan dalam draf tersebut. Sehingga pengurus dan pengawas koperasi dapat memberikan masukan berdasarkan situasi operasional di lapangan, pembicaraan dilakukan secara partisipatif dengan metode mendiskusikan pasal demi pasal dalam draf tersebut. Pendekatan partisipatif ini sangat penting agar kebijakan yang dibuat tidak hanya sesuai dengan peraturan akuntansi, tetapi juga dapat dilaksanakan dalam penata keuangan sehari-hari di koperasi (Setiawan, Kristiawati, Febriati, & Sartono, 2026).



Gambar 1. *Workshop* Saat Paparan Dilanjutkan Diskusi Materi Draft PERSUS Kebijakan Akuntansi KPUD Kieskendo.

Hasil dari *workshop* menunjukkan bahwa pengurus dan pengawas koperasi lebih memahami pentingnya kebijakan akuntansi sebagai standar untuk mengelola keuangan koperasi. Peserta mulai menyadari bahwa laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi biasa, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota koperasi dan sumber keputusan organisasi. Peserta juga belajar tentang prinsip akuntansi berbasis akrual, rekonsiliasi transaksi, dokumentasi yang memadai, dan pengendalian internal untuk mencegah laporan keuangan yang salah.

Kapasitas pengelola koperasi untuk membuat laporan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan diharapkan dapat meningkat sebagai hasil dari pelatihan dan pendampingan akuntansi koperasi (Dewi, Arif, Dewi, Aprilia, & Putri, 2024). Untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan dan praktik operasional KPUD Kieskendo, diskusi draf PERSUS menghasilkan beberapa penyesuaian penting.

Penyesuaian termasuk rekonsiliasi simpanan anggota, peraturan otorisasi transaksi, pengelolaan dokumen pinjaman, penerapan otorisasi dua arah untuk transaksi kas tertentu, dan proses pembentukan CKPN untuk pinjaman yang bermasalah. Pengurus dan pengawas koperasi juga setuju bahwa peraturan harus dibuat untuk memastikan bahwa transaksi koperasi tidak dilakukan dengan rekening pribadi dan bahwa sistem pencatatan keuangan harus memiliki riwayat audit. Hasil penyelarasan ini menunjukkan bahwa membuat kebijakan akuntansi koperasi memerlukan pengetahuan tentang karakteristik operasional koperasi dan praktik akuntansi (Salman & Sutisna, 2025).

Draf final Peraturan Khusus tentang Kebijakan Akuntansi, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan operasional KPUD Kieskendo, merupakan tujuan utama kegiatan ini. Diharapkan dokumen ini akan berfungsi sebagai standar resmi untuk proses pencatatan, penyusunan laporan keuangan, pengendalian internal, dan pengawasan keuangan koperasi. Keberadaan PERSUS ini juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan koperasi, terutama di tengah tuntutan pengawasan kelembagaan koperasi yang semakin ketat dan penerapan SAK EP (Okfitasari & Suprihati, 2025), (Kamil, Istianingsih, Yolifiandri, Anjarwati, & Irawan, 2025). Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan dokumen kebijakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran pengurus dan pengawas tentang pentingnya tata kelola keuangan koperasi yang profesional dan berkelanjutan (Salman & Sutisna, 2025).



Gambar 2. Penyerahan Draf PERSUS Kebijakan Akuntansi (yang Sudah Final) Kepada KPUD Kieskendo.

Kegiatan lain yang dilakukan oleh tim yang berkomitmen untuk pengurus koperasi adalah merencanakan untuk menerapkan secara bertahap PERSUS Kebijakan Akuntansi yang telah disusun.

Implementasi ini mencakup peningkatan pengawasan internal koperasi, peningkatan sistem dokumentasi, penyesuaian prosedur pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada SAK EP. Agar pengurus dan pengawas koperasi dapat menerapkan kebijakan secara konsisten dalam operasi sehari-hari, diperlukan lebih banyak pendampingan. Diharapkan KPUD Kieskendo dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan kepercayaan anggota, dan mewujudkan tata kelola koperasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan menerapkan kebijakan akuntansi yang didokumentasikan dan dipahami bersama (Yusmaniarti, Bahrin, Hutabarat, & Fitria, 2025).

4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui workshop dan pendampingan penyusunan PERSUS tentang Kebijakan Akuntansi pada KPUD Kieskendo Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan telah memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pemahaman pengurus dan pengawas koperasi mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan koperasi. Kegiatan ini telah meningkatkan pemahaman pengurus dan pengawas koperasi tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan koperasi. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana SAK EP diterapkan, mengapa pengawasan internal sangat penting, bagaimana memastikan semua transaksi dicatat dengan benar, serta bagaimana menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Workshop yang dilaksanakan secara partisipatif dapat membantu peserta terlibat secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan operasional koperasi (Salman & Sutisna, 2025).

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebelumnya KPUD Kieskendo tidak memiliki kebijakan akuntansi tertulis yang dapat digunakan sebagai standar resmi untuk proses pencatatan dan pelaporan keuangan koperasi. Draf PERSUS Kebijakan Akuntansi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola koperasi. Ini mencakup pengendalian internal, pengelolaan kas dan pinjaman, pembentukan CKPN, transaksi pihak berelasi, dan sistem audit dan pengawasan keuangan. Proses pembahasan draf secara partisipatif menghasilkan berbagai penyesuaian yang berkaitan dengan kebutuhan operasional koperasi. Ini membuat kebijakan yang dibuat tidak hanya sesuai dengan standar akuntansi tetapi juga menjadi pedoman yang dapat digunakan dalam operasi sehari-hari di koperasi (Setiawan, Kristiawati, Febriati, & Sartono, 2026).

Diharapkan bahwa kebijakan akuntansi dalam PERSUS ini akan membantu dalam penyusunan laporan keuangan koperasi yang lebih andal, transparan, dan akuntabel. Kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan dokumen kebijakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran pengurus dan pengawas tentang pentingnya tata kelola keuangan koperasi yang profesional dan berkelanjutan. Dibutuhkan komitmen berkelanjutan dari pengurus koperasi dan pendampingan lanjutan untuk memastikan bahwa semua ketentuan dalam PERSUS diterapkan secara konsisten dalam operasional sehari-hari koperasi (Dewi, Arif, Dewi, Aprilia, & Putri, 2024).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada: 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STIE Pelita Nusantara yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dana, sarana dan prasarana. 2) KPUD Kieskendo yang telah bermitra dengan STIE Pelita Nusantara.

DAFTAR REFERENSI

- Agha, R. Z., & Fitria, W. (2024). Penyusunan Tindakan Perbaikan Sistem Pengendalian Internal Piutang pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) JRX. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 23(2). doi:<https://doi.org/10.32722/eb.v23i2.7105>
- Ayu, R. D., Cahyono, D., & Aspiradi, R. M. (2021). Systematic Literature Review: Kualitas Laporan Keuangan Pada Koperasi. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 37-48. Retrieved from <https://ejournal.utmj.ac.id/akuntansi/en/article/view/279/262>
- Bengang, K., & Astuti, T. D. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Dharma Bakti. *Journal of Education Research*, 4(4), 1991-1998. doi:<https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.629>
- Dewi, R. R., Arif, A., Dewi, R. N., Aprilia, H., & Putri, A. L. (2024). Improving Accounting Competencies Based on SAK ETAP for Inkopad Cooperative Employees through Training. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 298-304. doi:<https://doi.org/10.32815/jpm.v5i1.1957>
- Grahita, N. K., Budiadnyani, N. P., Sunarta, I. N., & Arlita, I. D. (2025). Peran Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal dan Transparansi Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus koperasi Di Wilayah Kabupaten Bangli). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 25(2), 1-10. doi:<https://doi.org/10.29040/jap.v25i2.16198>
- Icih, Nursafitri, N., Nabilah, N. A., Gumelar, M. R., Insani, V. N., & Lestari, N. D. (2024). Penguatan Akuntabilitas Pengurus Koperasi Melalui Sosialisasi PERMENKOP Nomor 2 Tahun 2024 Di Koperasi Kabupaten Subang. *MESTAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 379-385. doi:<https://doi.org/10.58184/mestaka.v3i4.429>

- Kamil, I., Istianingsih, Yolifiandri, Anjarwati, S., & Irawan, I. A. (2025). Edukasi Pelaporan Keuangan Koperasi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) Langit Biru*, 6(1), 18-23. Retrieved from <https://journal.ppicurug.ac.id/index.php/jpkm/article/view/1269>
- Khairunnisa, Aminah, W., Rikumahu, B., & Al-Fikri, D. T. (2024). Workshop sebagai Metode Pembelajaran dalam Meningkatkan Literasi Akuntansi Pelaku SME. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 3(2), 98-103. Retrieved from <https://journal.adpebi.com/index.php/JPMa/article/view/1009/819>
- Lestari, D., & Saputra, D. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Simpan Pinjam Sorek Maju Bersama Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ekonomi Kiat*, 33(2), 12-22. doi:[https://doi.org/10.25299/kiat.2022.vol34\(1\).10981](https://doi.org/10.25299/kiat.2022.vol34(1).10981)
- Luhglatno, Adhi, D. K., & Aminatuzzuhro. (2023). Pendampingan Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi KPRI "Dian Husada" Kabupaten Demak dengan Menggunakan Microsoft Excel. *Minda Baharu*, 3(1), 122-131. Retrieved from <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/MNDBHRU/article/view/5058/pdf>
- Maulana, J., Marismiati, & Wirakanda, G. (2023). Analisis Penerapan SAK Entitas Privat (SAK EP) pada Laporan Keuangan Koperasi XYZ. *Land Journa*, 4(2), 101-107. doi:<https://doi.org/10.47491/landjournal.v4i1.2985>
- Mawardi, M. S., & Herawati, N. T. (2024). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Berdasarkan Sak-Etap, Pengalaman Kerja, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Serba Usaha Se-Kecamatan Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15(2), 371-385. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/76747/30283>
- Miranda, M. S., Wahyuni, S. R., Wulandari, J., & Hendra, J. (2025). Penerapan Analisis Laporan Keuangan untuk Meningkatkan Transparansi Keuangan Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(2), 5374-5380. Retrieved from <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/46264/28598>
- Okfitasari, A., & Suprihati. (2025). Akuntabilitas Keuangan Koperasi di Indonesia dengan Permenkop Nomor 2 Tahun 2024. *Edunomika*, 1-11. Retrieved from <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/17656/7585>
- Prastiwi, A., Atmini, S., Hanafia, H., & Putri, E. S. (2023). Penyusunan Kebijakan Akuntansi Lembaga Non Profit LAZISNU Kab Malang Sesuai PSAK Syariah Untuk Meningkatkan Akuntabilitas. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(5), 321-327. Retrieved from <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/2467/1606>
- Sagala, F., Asnawi, M., Matani, C. D., Patma, K., Sesa, P. V., & Paru, S. M. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan, Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus pada Koperasi di Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 20(1), 98-108. doi:<https://doi.org/10.52062/jaked.v20i1.4611>
- Salman, K. R., & Sutisna. (2025). Implementasi SAK Entitas Privat (SAK EP) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Tahun 2024. *Jurnal Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 18-25. doi:<https://doi.org/10.14414/kedaymas.v6i2.5256>

- Saputra, D. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Simpan Pinjam Sorek Maju Bersama Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ekonomi Kiat*, 33(2), 12-22. doi:[https://doi.org/10.25299/kiat.2022.vol34\(1\).10981](https://doi.org/10.25299/kiat.2022.vol34(1).10981)
- Setiajatnika, E., & Hidayat, U. (2025). Komparasi Standar Akuntansi Keuangan SAK ETAP dan SAK EP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi. *J-Coop : Journal of Co-Operative*, 1(2), 177-188. doi:<https://doi.org/10.32670/jc.v1i2.21>
- Setiawan, A., Kristiawati, E., Febriati, & Sartono. (2026). Socialization of Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK-EP) in CU. PUSKOPCUINA. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(2), 632-643. doi:<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v10i2.29645>
- Turi, L. O., & Muharram, A. I. (2023). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Koperasi terhadap Tingkat Kepercayaan Anggota Koperasi. *Jurnal Economina*, 2(12), 3787-3797. doi:<https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1103>
- Yusmaniarti, Bahrin, K., Hutabarat, S. M., & Fitria, D. (2025). Transformasi Laporan Keuangan Koperasi Menuju Standar Akuntansi: Program Pelatihan dan Pendampingan di KPN Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(2), 153-162. doi:<https://doi.org/10.70248/jpmebd.v2i2.2721>